

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur staf dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2015.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 yang berpedoman pada Inspres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 di maksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN.
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Permenpan No 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Bab IV tentang Kedudukan, tugas dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten/Kota bagian ketiga Pasal 12 ayat (5) yang berbunyi Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 pada Bab II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 2 yang menyatakan "Inspektorat Kabupaten merupakan unsure pengawas Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah".

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah NO 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Bab II Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 yang berbunyi "Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten serta atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa".

b. Fungsi

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan program pengawasan;
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- d. Melaksanakan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan evaluasi kinerja;
- e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan
- h. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Inspektorat;

1.3.3. Susunan Organisasi dan Personil

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah Nomor 10 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara serta

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Kutai Kartanegara sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2012 tersebut antara lain :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan ;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
- h. Kelompok Jabatan P2UPD.

Sedangkan adapun jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 2012 adalah sebanyak 117 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai (PNS)
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	
1	Inspektur	1	Orang
2	Sekretaris	1	Orang
3	Inspektur Pembantu	4	Orang
4	Kepala Sub Bagian	3	Orang
5	Jabatan Fungsional Auditor	26	Orang
6	Jabatan Fungsional P2UPD	12	Orang
JUMLAH		47	Orang

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat /	Golongan	Jumlah	
1.	Pembina Tk. I	IV/b	5	Orang
2	Pembina	IV/a	10	Orang
3	Penata Tk. I	III/d	19	Orang
4	Penata	III/c	13	Orang
5	Penata Muda Tk. I	III/b	21	Orang
6	Penata Muda	III/a	7	Orang
7	Pengatur Tk. I	II/d	2	Orang
8	Pengatur	II/c	1	Orang
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	13	Orang
10	Pengatur Muda	II/a	6	Orang
11	Juru	I/c	1	Orang
	THL	-	19	Orang
JUMLAH			117	Orang

1.4 Aspek Strategik yang Berpengaruh

Aspek strategik Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari faktor internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Unsur Kekuatan

- 1) Adanya peraturan di bidang pengawasan;
- 2) Tersedianya sumber daya manusia aparatur pengawas;
- 3) Adanya motivasi kerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang tinggi;

b. Unsur Kelemahan

- 1) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pengawas masih kurang;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana;
- 3) Terbatasnya anggaran pengawasan;

2. Faktor Eksternal

a. Unsur Peluang

- 1) Dukungan dari atasan langsung;

- 2) Dukungan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya (APIP) :
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat Jenderal, BPK,
dan BPKP;
 - 3) Tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah;
- c. Unsur Ancaman
- 1) Pengaruh politis dalam upaya penegakan hukum;
 - 2) Tidak konsistennya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat dalam konteks otonomi/ kewenangan daerah;

1.5 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2012. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2012.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang

ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategik Tahun 2011-2015

2.1.1 Visi dan Misi

2.1.1.1 Visi

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai internal/fungsional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Aparatur Pengawas bertanggung jawab secara berjenjang kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan prinsip dalam melaksanakan tugas berpegang terhadap kemandirian serta menjunjung tinggi etika dan moral, sehingga dapat bertindak objektif untuk mencapai hasil yang maksimal harus didukung oleh aparatur pengawas yang memiliki dedikasi yang akuntabel serta teruji di bidangnya (profesional).

Adapun Visi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Lembaga dan Aparatur yang Efektif dan Efisien Untuk Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik”.

Dari Visi tersebut di atas diharapkan agar semua aparatur pengawas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara objektif, tangguh dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang menjadi tanggung jawabnya serta mempertanggungjawabkan hasil yang telah dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

2.1.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu disusun Misi yang merupakan rumusan masalah mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi pengawasan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2011-2015 yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Mewujudkan penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan;
3. Meningkatkan Profesionalisme aparatur pengawasan dan sarana pengawasan.
4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dibidang pengawasan.

2.1.1.3 Tujuan

Pengawasan sebagai tolak ukur sangat relevan dengan fungsi dan manajemen diklat dari eksestensinya akan sangat berperan sebagai alat pengendali setiap pelaksanaan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diawali dengan proses perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan yang profesional.
2. Mewujudkan aparatur yang memiliki komitmen dalam melaksanakan arah kebijakan organisasi.
3. Meningkatkan peranan pengawasan masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2.1.1.4 Sasaran

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterampilan aparatur pengawasan yang professional melalui pendidikan dan pelatihan.

2. Meningkatnya kualitas system pengawasan.
3. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja dalam menunjang kegiatan pengawasn.
4. Meningkatnya peranan pengawasan dan mutu-mutu hasil pengawasan.
5. Meningkatnya koordinasi dengan dinas sektoral terkait untuk memonitoring dan mengevaluasi jalannya pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan.
6. Meningkatnya pembinaan pengawasan masyarakat melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun lembaga lainnya.
7. Meningkatnya pengawasan atasan langsung terhadap kinerja bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.1.5 Strategi

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pemerintahan sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. Prioritas yang dilakukan adalah :

1. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan pengawasan.
2. Mengikutsertakan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang pengawasan baik pusat maupun daerah.
4. Pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja bagi aparatur pengawasan dalam mendukung kegiatannya.
5. Melaksanakan fungsi pengawasan yang independen dan akuntabel.
6. Melaksanakan fungsi pengawasan masyarakat.
7. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan serta informasi masyarakat.
8. Memberikan rekomendasi berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap bawahannya.

2.1.1.6 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun langkah-langkah melalui tahapan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik, meliputi :

- a. Memberikan asistensi/pembinaan terhadap unit satuan kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan system akuntabilitas.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap unit satuan kerja melalui pelaksanaan pengawasan.
2. Kebijakan Teknis, meliputi :
- a. Kebijakan perencanaan kegiatan pengawasan tahunan
 - b. Kebijakan operasional pengawasan.
 - c. Kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - d. Kebijakan informasi hasil pengawasan.
 - e. Kebijakan penanganan kasus.
3. Kebijakan sarana dan prasarana, meliputi :
- a. Kebijakan pemanfaatan sarana dan prasarana
 - b. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana system pengawasan.
4. Kebijakan aparatur pengawasan, meliputi :
- a. Kebijakan pengembangan pegawai dibidang pengawasan.
 - b. Kebijakan pembinaan moral pegawai.
 - c. Kebijakan peningkatan kesejahteraan pegawai.
 - d. Kebijakan penghargaan dan sanksi.
5. Kebijakan pelayanan masyarakat, meliputi :

- a. Kebijakan penanganan kasus pengaduan masyarakat.
- b. Kebijakan pengembangan pengawasan masyarakat.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2012

Adapun upaya untuk mencapai sasaran, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 merencanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dalam pencapaian Sistem Pengendalian Manajemen (SPM). Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Program Utama

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

- a. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, alokasi anggaran senilai Rp.4.000.971.025,- dari target kinerja sebanyak 200 SKPD dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, target kinerja sebanyak 200 kasus dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Alokasi anggaran senilai Rp.850.000.000,-.
- c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, target kinerja sebanyak 289 titik lokasi dengan alokasi anggaran senilai Rp,1.733.829.200,- dengan lokasi kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- d. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan dengan target kinerja 222 temuan, alokasi anggaran senilai Rp.613.297.000,- lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Kegiatan Penyelesaian Kasus TP-TGR dengan alokasi anggaran senilai Rp.233.780.800,- dengan target 10 perkara, lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2.2 Program Penunjang

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pemetaan Pelaksanaan SPIP, target kinerja 50 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.536.621.480,- yang dilaksanakan di dalam dan di luar Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya sebanyak 97 stel, dengan alokasi anggaran senilai Rp.248.233.000,-, pakaian khusus hari-hari tertentu dengan target kinerja sebanyak 97 stel, dengan alokasi anggaran senilai Rp.149.988.700,- yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan alokasi anggaran senilai Rp.1.499.999.960,- dengan target kinerja 50 orang auditor dan P2UPD, lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca dengan alokasi anggaran senilai Rp.335.933.600,- target kinerja 50 orang auditor dan P2UPD, lokasi kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Bimbingan Teknis Evaluasi LAKIP DAN LKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp.224.196.700,- dengan target kinerja sebanyak 65 orang auditor dan P2UPD, kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Bimbingan Teknis Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri, dengan alokasi anggaran senilai Rp.243.990.400,- target kinerja sebanyak 65 orang Auditor dan P2UPD, lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Bimbingan Teknis Evaluasi Pelaksanaan Dana BOS, dengan alokasi anggaran senilai Rp.269.594.100,- dengan target kinerja 65 orang Auditor dan P2UPD, lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

- f. Pelatihan Penyusunan Kertas Kerja Audit, dengan alokasi anggaran senilai Rp.335.933.600,- dengan target kinerja 65 orang Auditor dan P2UPD, lokasi kegiatan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- g. Pelatihan Penyusunan LHP Reguler, Kasus dan Monitoring dengan alokasi anggaran senilai Rp.259.910.600,- dengan target kinerja 50 orang Auditor dan P2UPD, lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan dengan alokasi anggaran senilai Rp.145.050.000,- target 4 laporan dan lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran senilai Rp.1.647.234.600,- target kinerja 350 orang, lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Kegiatan Sosialisasi LHKPN dengan alokasi anggaran senilai Rp.577.841.700,-, target kinerja 190 orang, lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

- b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan target kinerja 1 laporan alokasi anggaran senilai Rp.499.999.800,-, lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Kegiatan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan dengan alokasi anggaran senilai Rp.186.000.000,- target kinerja 1 paket, lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan Penyusunan Buletin Pengawasan Internal (Wasnal) dengan alokasi anggaran senilai Rp.150.000.000,- target kinerja 1 paket, lokasi kegiatan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp.49.999.900,- target kinerja 4 laporan, lokasi kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan Alokasi anggaran senilai Rp.1.431.937.000,- target kinerja 104 unit, yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan target kinerja 44 Unit kendaraan dengan alokasi anggaran senilai Rp.275.550.000,- target kinerja 8 unit, yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor alikasi anggaran senilai Rp.400.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 1 Unit, lokasi kegiatan dilaksanakan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

11. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan penyediaan surat menyurat dengan target kinerja sebanyak 100% dengan alokasi anggaran senilai Rp.6.691.100,-, dengan lokasi kegiatan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran senilai Rp.256.800.000,- target kinerja 100% dan lokasi kegiatan dilaksanakan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

- c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dengan anggaran senilai Rp.497.196.000,- lokasi kegiatan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan anggaran senilai Rp.89.700.000,- target kinerja 30 unit, dengan lokasi kegiatan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dengan Alokasi anggaran senilai Rp.100.000.000,- target kinerja sebanyak 58 Item, dengan lokasi kegiatan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran senilai Rp.97.240.000,- target kinerja 4 item, lokasi kegiatan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran senilai Rp.16.250.000,- lokasi kegiatan di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran senilai Rp.32.300.000,- target kinerja sebanyak 10.269 Eksemplar, lokasi kegiatan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- i. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran senilai Rp.26.992.500,- target kinerja sebanyak 10 Bulan,

dengan lokasi kegiatan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

- j. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan alokasi anggaran senilai Rp.1.292.722.000,- target kinerja sebanyak 84 orang, lokasi kegiatan di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- k. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran dengan alokasi anggaran senilai Rp.377.400.000,- target kinerja sebanyak 33 Orang dengan lokasi kegiatan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
- l. Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dengan alokasi anggaran senilai Rp.48.000.000,- lokasi kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Dalam kurun waktu tahun 2012 dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menekan penyimpangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Reguler.
2. Pemeriksaan Kasus.
3. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Review Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD.

Untuk dapat mengukur kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sebagai data pembandingnya diambil data dari tahun 2011, sehingga tingkat keberhasilan program dan kegiatan dapat diukur semaksimal mungkin.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2012 dengan perincian yaitu diarahkan kepada pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah desa yang diperiksa sebanyak 153 desa/kelurahan kepada pemeriksaan rutin sebanyak 70 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Kantor Camat.

Dari data tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Pelaksanaan Pengawasan
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Pemeriksaan	Tahun	
		2011	2012
1	Reguler	70	47
3	Kasus	-	6
4	ADD	151	47
5	Review Keuangan	-	-

Sumber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Itkab Kukar 2011

Dari hasil pemeriksaan dilapangan, hasil temuan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut terbagi dua katagori temuan yaitu temuan administrasi dan temuan kerugian Negara/Daerah. Dapat dijelaskan disini maksud temuan administrasi adalah Aparatur yang diperiksa tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai administrasi keuangan, administrasi barang maupun administrasi kepegawaian.

Sedangkan temuan kerugian Negara/ Daerah adalah Aparatur yang diperiksa melalaikan kewajibannya khususnya berkaitan dengan keuangan antara lain setoran pajak, retribusi daerah dan lain sebagainya.

Dari data tahun 2011 hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel. 3.2
Klasifikasi Hasil Rekomendasi Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Jenis Temuan	Tahun			Keterangan
		2011	2012	%	
1	Administrasi		-		-
2	Kerugian Negara/Daerah	101	430		-
Total Rekomendasi					-

Sumber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Itkab Kukar 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2011 jumlah temuan baik administrasi maupun kerugian negara/daerah semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman Aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menunjukkan perbaikan yang signifikan cenderung menurun.

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperlukan memonitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui sampai sejauh mana Aparatur yang diperiksa tersebut telah memenuhi kewajibannya terhadap hasil temuan yang telah disampaikan.

Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini dilakukan sampai sejauh mana ketaatan aparatur yang diperiksa terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergambar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dari data tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 hasil monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel. 3.3
Hasil Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
Rekomendasi Yang Telah Diselesaikan

No	Tahun Pemeriksaan	Rekomendasi Selesai	Sisa Rekomendasi
1	2010	395	493
2	2011	288	95

Sumber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Itkab Kukar 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara belum diselesaikan oleh auditan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa temuan yang mengharuskan auditan yang dimaksud untuk melakukan kewajiban setornya yang belum dilaksanakan. Selain itu juga ada beberapa pegawai di SKPD yang

bersangkutan ada yang telah mutasi dan pensiun sehingga menyulitkan untuk pemenuhan rekomendasi tersebut.

Selain rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimonitoring oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, juga kerugian negara/daerah serta kewajiban kepada negara/daerah yang diwajibkan kepada Aparatur yang diperiksa.

Tabel. 3.4
Kerugian Negara dan Kewajiban Kepada Negara
Dari Hasil Pemeriksaan

No	Tahun	Kerugian Negara	Disetor	Sisa	Kewajiban	Disetor	Sisa
1	2011	2.848.816.649,56	1.689.096.726,12	1.159.719.923,44	1.055.750.196,50	600.826.075.52	454.924.120.98
2	2012	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2.848.816.649,56	1.689.096.726,12	1.159.719.923,44	1.055.750.196,50	600.826.075.52	454.924.120.98

Suber data : Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Itkab 2011

Dari data tabel tersebut diatas dilihat bahwa dari tahun 2011 diselesaikan oleh SKPD yang memiliki kewajiban setor terhadap negara/daerah, sedangkan pada temuan pemeriksaan tahun 2012 terkait hasil pemeriksaan oleh Inspektorat masih dalam tahap inventarisasi.

Sampai saat ini masih terdapat kewajiban setor yang harus dimonitoring lebih lanjut sebesar Rp.454.924.120.98,- untuk Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor. Kewajiban setor ini sebagian besar merupakan temuan pemeriksaan terhadap pajak yang belum disetorkan oleh auditan dan kelebihan volume pekerjaan fisik dilapangan.

Selain pemeriksaan terhadap kegiatan rutin maupun proyek Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa, juga Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pengaduan dari masyarakat tentang kinerja pemerintah maupun dilingkungan masyarakat sekitarnya. Penanganan kasus dari masyarakat ini diperoleh baik secara langsung dari masyarakat maupun instruksi dari Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara untuk menangani aduan masyarakat tersebut.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 pengaduan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan jumlah pengaduan. Ini dilihat dari banyaknya aduan yang disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara maupun ke Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Adapun data pengaduan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 3.5
Jenis Pengaduan Masyarakat
Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012

No	Jenis Pengaduan	Tahun		
		2011	2012	%
1	Disiplin Pegawai	32		-
2	Penyalahgunaan Wewenang	13	3	-
3	Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan	11	3	-

Dari jumlah pengaduan masyarakat tersebut diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2012 jumlah pengaduan tersebut terus mengalami penurunan terhadap semua jenis pengaduan.

Sesuai dengan tupoksi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang pengawasan dan pembinaan, maka pengaduan masyarakat tersebut langsung ditindaklanjuti dengan membuat Tim dengan tujuan adalah untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dari pengaduan masyarakat tersebut.

Dari hasil pemeriksaan dilapangan bahwa pengaduan masyarakat tersebut dapat tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.6
Hasil Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
Sejak tahun 2010 s.d 2011

No	Tahun	Jumlah Aduan	Ditindak Lanjuti	Tidak Terbukti	Terbukti
1	2011	56	41	12	29
2	2012	6	6	-	6

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sampai dengan tahun 2011 jumlah pengaduan masyarakat tersebut terus meningkat dan pengaduan yang ditindak lanjuti hanya berapa prosentase saja. Kemudian dari hasil pemeriksaan dilapangan pengaduan masyarakat yang terbukti sebanyak 6 kasus.

Selain pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, ada juga pengawasan yang dilakukan oleh Instansi Pusat maupun Propinsi. Instansi pusat tersebut adalah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur maupun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur. Sedangkan dari Propinsi

adalah Inspektorat Propinsi Kalimantan Timur yang mengawasi pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten/Kota se propinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang langsung menjadi pengawasan instansi tersebut. Dan hasil dari pemeriksaan pengawasan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur tersebut pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.7
Hasil Temuan dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur
Periode tahun 2010 s.d 2011

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Yang Ditindaklanjuti	Sisa Rekomendasi
1	2011	24	75	30	45
2	2012	24	56	22	34

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil temuan dari BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2012 mengalami penurunan jumlah temuan. Temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur ini adalah banyak menitikberatkan kepada kasus-kasus yang dinilai oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur berindikasi penyimpangan.

Sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tersebut, ada beberapa rekomendasi yang telah ditindak

lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bahkan ada beberapa kasus yang ditemukan oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tersebut yang berujung di pengadilan karena penyimpangan yang dilakukan sudah melampaui batas kewajaran sehingga merugikan negara/daerah.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program sebagaimana kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2012, adapun alokasi dana dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012

Nomor Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	BELANJA	27.744.251.436	19.893.281.438
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persendian		
1.20.07	INSPEKTORAT	27.744.251.436	19.893.281.438
1.20.07.01	INSPEKTORAT	27.744.251.436	19.893.281.438
1.20.07.01.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.659.740.696	5.762.535.219
1.20.07.01.1.1	Belanja Pegawai	6.659.740.696	5.762.535.219
1.20.07.01.2	BELANJA LANGSUNG	21.084.510.740	14.119.221.219
1.20.07.01.2.1	Belanja Pegawai	3.113.590.500	1.980.615.694
1.20.07.01.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.418.754.240	11.365.567.525
1.20.07.01.2.3	Belanja Modal	1.552.166.000	784.563.000

Sumber data : Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 2012

Melihat tabel di atas dapat dijelaskan bawah penyerapan alokasi dana tahun 2012 yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara 71,65%. Berarti dana yang belum bisa direalisasikan sampai akhir tahun 2011 tersebut sebesar Rp.7.856.344.998,-

Selanjutnya sesuai dengan pengukuran capaian kinerja suatu instansi pemerintah perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai sejauh mana capaian program dan kegiatan tersebut dijalankan dengan dana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun standar pengukur capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.9
Pengukuran Capaian Kinerja
Program dan Kegiatan

No	Rentang Capaian	Katagori
1	Capaian \geq 100%	Memuaskan
2	$85\% \leq$ capaian $<$ 100%	Sangat Baik
3	$70\% \leq$ capaian $<$ 85%	Baik
4	$55\% \leq$ capaian $<$ 70%	Cukup
5	Capaian \leq 55%	Kurang

Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan perincian program sebanyak 11 program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 39kegiatan.

Sesuai dengan tabel diatas pencapaian kerja program dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel. 3.10
Capaian Kinerja Program
Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012

No	Rentang Capaian	Katagori	Jumlah Program
1	Capaian \geq 100%	Memuaskan	1
2	85% \leq capaian < 100%	Sangat Baik	2
3	70% \leq capaian < 85%	Baik	4
4	55% \leq capaian < 70%	Cukup	1
5	Capaian \leq 55%	Kurang	-
Jumlah Program			8

Kemudian untuk capaian kinerja kegiatan, dimana Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan sebanyak 39 kegiatan antara lain sebagai berikut :

Tabel. 3.11
 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
 Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Tahun 2011

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Hasil (%)	Keterangan
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
	1 Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala	SKPD	175	178	101,71	Sangat memuaskan
	2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kasus	52	44	84,62	Sangat Baik
	3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Titik	289	284	98,27	Sangat Baik
	4 Inventarisasi Temuan Pengawasan	Temuan	222	137	62	Baik
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	2 Pemetaan Pelaksanaan SPIP	OK	50	40	80,00	Baik
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	1	25	Kurang Baik
4	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					
	1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	OK	52	26	50	Kurang Baik
	2 Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca	Orang	65	65	100,00	Sangat Baik
	3 Bimbingan Teknis Evaluasi LAKIP dan LKPD	Orang	65	65	100,00	Sangat Baik
	4 Bimbingan Teknis Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri	Orang	65	65	100,00	Sangat Baik
	5 Bimbingan Teknis Evaluasi Pelaksanaan Dana BOS	Orang	65	65	100,00	Sangat Baik
	6 Pelatihan Penyusunan Kertas Kerja Audit	Orang	65	65	100,00	Sangat Baik
7	7 Pelatihan Penyusunan LHP Reguler, Kasus dan Monitoring	Orang	65	65	100,00	Sangat Baik

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Hasil (%)	Keterangan
5	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Laporan	4	2	50	Kurang Baik
6	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Orang	350	350	100	Sangat Baik
7	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi					
	1 Sosialisasi LHKPN	OK	190	-	00,00	Kurang Baik
	2 Monitoring dan Evaluasi	Laporan	1	-	00,00	Kurang Baik
8	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan					
	Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan	Paket	1	-	00,00	Kurang Baik
9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa					
	Penyusunan Buletin Pengawasan Internal (Wasnal)	Paket	1	-	00,00	Kurang Baik
10	Peningkatan Disiplin Aparatur					
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	97	117	120,61	Sangat baik
	2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Stel	97	117	120,61	Sangat baik
11	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Unit	104	46	45,00	Kurang Baik
	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit/Liter BBM Liter Olie	8	8	100,00	
	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Unit	1	1	100	Sangat Baik

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Hasil (%)	Keterangan	
12	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Posentase	100	25	17,86	Kurang
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening	100%	5	83,33	Baik
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	12	100,00	Sangat Baik
	4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	30	128	97,71	Baik
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	item	58	58	100,00	Sangat Baik
	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	item	4	19	100,00	Sangat Baik
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Macam	1081	0	00,00	Kurang
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Exp/Buku	10269	0	00,00	Kurang
	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Item	13	15	83,33	Baik
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Porsi	720	1		Kurang
	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	OH	84	84	100	Sangat Baik
	12	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Orang	33	33	100,00	Sangat Baik
	Inventarisasi Aset SKPD	-	-	-	00,00	Kurang Baik	
	Penyusunan RKA SKPD	Orang	50	-	00,00	Kurang Baik	

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 2012

Dari hasil capaian kinerja baik program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012 di atas dapat dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi harapan yang telah ditetapkan khususnya yang capaian kerjanya masih dianggap kurang, sehingga diharapkan di tahun-tahun berikutnya bisa lebih ditingkatkan.

3.3 Kelemahan dan Kekuatan Internal

3.3.1 Kelemahan Internal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa tak lepas dari kelemahan internal khususnya sumber daya manusia. Hal ini akan memengaruhi kinerja dalam pelayanan masyarakat.

Hal tersebut juga terjadi pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di mana kelemahan internal yang dialami adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga auditor dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan.
2. Anggaran belanja yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirasakan belum diserap secara optimal.
3. Sering terlambatnya realisasi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
4. Waktu pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan serta monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang maksimal, sehingga hasil yang diperoleh di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

3.3.2 Kekuatan Internal

Dilihat dari kelemahan internal tersebut di atas, seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah berkomitmen untuk mewujudkan visinya terdahulu yaitu terwujudnya pengawasan yang objektif, tangguh dan bertanggungjawab disertai dengan pengawasan masyarakat.

Adapun kekuatan Internal yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Sebagian Pejabat Struktural dan Staf Golongan III (tiga) yang ada di Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di perbantukan sebagai Pejabat Fungsional Auditor.
2. Anggaran Belanja yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan semaksimal mungkin.
3. Waktu pelaksanaan pengawasan dan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan digunakan sesuai dengan Anggaran Belanja yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia aparatur yang dimiliki sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam pelayanan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Keberhasilan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada tahun 2011, meliputi 8 Program dan 26 Kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 tersebut, 6 kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil capaian kinerja rata-rata kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan katagori rata-rata baik yaitu dikisaran antara $70\% \leq \text{capaian} < 85\%$.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta Langkah Antisipatif

Dalam tahun 2011 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

1. Tidak tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia

3. Kurangnya tenaga fungsional yang dimiliki
4. Terlambatnya pencairan dana dari Pemerintah Daerah.

4.3. Strategi Pemecahan Masalah

Melihat dari kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka strategi yang dapat diambil dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Membuatkan jadwal setiap kegiatan yang telah disepakati bersama antara pelaksana kegiatan dan Pengguna Anggaran, sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat waktu.
2. Mengusulkan rekrutmen pegawai dari masing-masing SKPD setelah dinyatakan lulus sertifikasi jabatan fungsional auditor dan P2UPD dengan mengajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktifitas pegawai Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Mempercepat penyelesaian SPj kegiatan yang telah diselesaikan oleh masing-masing PPTK.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012, semoga dapat

bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparaturnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Maret 2013
Inspektur,

Drs. H. Machmudan, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710305 199202 1 002

No.	N a m a	Jabatan	Paraf
1.	Abdullah Pannusu, SH, M.Si	Sekretaris	
2.	Muriyanto, S.STP	Kasubag. Penyusunan Prog. & Keu.	